

ABSTRAK

M. Ainun Rokhman, 2025. *Pemenuhan Kebutuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Di Pabrik Rokok PT Maju Melaju Dradah Kabupaten Lamongan. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.*

Buruh perempuan seringkali menghadapi risiko yang lebih tinggi di tempat kerja serta hak-hak mereka yang kurang di perhatikan karena budaya patriarki dan deskriminasi yang masih sangat melekat di Indonesia sampai saat ini, menganggap wanita lebih lemah dan rentan dibanding dengan laki-laki sehingga mereka lebih mudah untuk dieksploitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan serta hambatan hak-hak para pekerja buruh perempuan pada perusahaan pembuatan rokok yaitu PT Maju Melaju Dradah Lamongan apakah hak-hak buruh perempuan pada perusahaan tersebut sudah dipenuhi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang meliputi pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta menggunakan teori kebutuhan Abraham Maslow yang meliputi tingkat kebutuhan Fisiologi, Keamanan, Sosial, Penghargaan, dan Aktualisasi. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisa sehingga diperoleh hasil kemudian disimpulkan. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur, buku, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan hak pekerja buruh perempuan dalam lingkup perusahaan PT Maju Melaju belum sepenuhnya terpenuhi berdasarkan dari teori Abraham Maslow. Pada salah satu pemenuhan fisiologi yaitu hak tentang cuti haid ternyata dalam lingkup perusahaan tersebut tidak terpenuhi dan digantikan dengan diperbolehkan istirahat di perusahaan jika dirasa pekerja sakit saat haid. Serta faktor penghambat dalam pemenuhan hak pekerja perempuan yaitu pihak Kepala Bidang Hubungan Industri ternyata bersifat permisif justifikasi yaitu standard ganda terhadap cuti haid dan faktor pendukung dalam pemenuhan kebutuhan hak-hak pekerja perempuan yaitu pihak Kepala Bidang Hubungan Industri melakukan pengawasan dan monitoring kepada semua pelaku industri di Kabupaten Lamongan. Dari kesimpulan tersebut peneliti dapat memberikan rekomendasi atau masukan bahwa untuk pemerintah seharusnya tidak memberikan standart ganda terhadap penerapan cuti haid serta untuk perusahaan seharusnya mereka memberikan treatment atau perlakuan sebaik mungkin kepada pekerja khususnya perempuan agar mereka merasa aman dan nyaman bekerja pada perusahaan tersebut.

Kata Kunci: Buruh Perempuan, Hak Pekerja Buruh, Undang-Undang Ketenagakerjaan